



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HARIBOWO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENYADARAN DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA
3. NHK : 221210

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 919.658.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m<sup>2</sup>/132 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 438.680.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m<sup>2</sup>/45 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 146.427.000
3. Tanah Seluas 599 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 334.551.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 198.500.000

1. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1983, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU TAFT JEEP Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. LAINNYA, ---(GENSET) MESIN LAINNYA Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
5. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E MT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 74.700.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 49.766.982**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.242.624.982



III. HUTANG

Rp. 70.554.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.172.070.982

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.